

TANTANGAN DALAM PERKEMBANGAN DESENTRALISASI DI INDONESIA

RIZKI AFRI MULIA

Program Studi Ilmu Administrasi Negara STISIP Imam Bonjol

Abstrak: Otonomi daerah dan desentralisasi, selain maraknya integrasi nasional, korupsi, dan partai politik, dibenahi secara aktif di negeri ini. Otonomi daerah merupakan proses negara yang belum selesai yang akan terus mengalami perubahan dan tidak akan pernah selesai. Kecenderungan pendekatan yang digunakan dalam artikel ilmiah juga menjadi topik yang menarik. Tentunya, dari berbagai penelitian yang dilakukan, dapat ditentukan bahwa prosedur tersebut menghadirkan berbagai kendala. Terkadang, penelitian juga meninggalkan pertanyaan yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren dalam mata pelajaran dan kesulitan serta menyusun pertanyaan terbuka yang belum terpecahkan dalam penelitian desentralisasi dari tahun 2017 hingga 2022. Analisis tren ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Google Scholar sebagai sumber data dan pendekatan tinjauan literatur sistematis. Hasil studi menunjukkan bahwa subjek penelitian desentralisasi yang paling banyak dipilih adalah kebijakan, politik daerah, dan pembangunan daerah. Persentase diskusi paling signifikan topik ini adalah 19,2%, diikuti oleh 15,4%. Pariwisata, politik budaya, politik hukum, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen sumber daya manusia berada di urutan terbawah, dengan gabungan 3,8%. Kecenderungan dalam metodologi penelitian desentralisasi adalah menggunakan metode "kualitatif". Pendekatan ini memiliki tingkat penggunaan tertinggi sebesar 92,3%. Sementara "kuantitatif" memiliki tren penggunaan terendah, dengan 7,7% dari semua kutipan, itu adalah istilah dengan frekuensi terendah. Tantangan dalam kajian desentralisasi meliputi konflik vertikal, kelembagaan reformasi, dan ketimpangan akses. Amerika Serikat secara geografis beragam karena geografinya sebagai negara kepulauan dan perbedaan regional dalam infrastruktur dasar, kapasitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Literature Review*, Tantangan, Desentralisasi

A. Pendahuluan

Otonomi daerah dan desentralisasi, selain maraknya integrasi nasional, korupsi, dan partai politik, dibenahi secara aktif di negeri ini. Otonomi daerah merupakan proses negara yang belum selesai yang akan terus mengalami perubahan dan tidak akan pernah selesai. Sentralisasi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi merupakan konsep pemerintahan daerah yang cukup dikenal dalam sistem pemerintahan Indonesia. Terkait dengan pemerintahan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tunduk pada 8 (delapan) perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini (UU Pemda). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Adanya delapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1945 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah mengalami perubahan dan perkembangan yang dinamis sejak kemerdekaan. Telah terjadi fluktuasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia dan otonomi yang diberikan kepada daerah. Awalnya, "otonomi otentik dan akuntabel" digunakan untuk mencirikan fenomena ini. (Thamrin, 2019). (Thamrin, 2019). Desentralisasi merupakan antitesis dari kebijakan sentralisasi pemerintah pusat. (Bida, 2021).

Kesenjangan pengetahuan tentang metode penelitian yang digunakan dalam studi desentralisasi merupakan masalah kontemporer. Kebanyakan sarjana menganjurkan metode penelitian kualitatif untuk desentralisasi, sementara yang lain menyukai pendekatan kuantitatif. Tidak ada penelitian tentang desentralisasi yang mempelajari tren, metodologi, atau perhatian penelitian tentang otonomi daerah. Oleh karena itu, penulis didesak untuk mengatasi kurangnya pengetahuan seputar tren, pendekatan, dan tantangan penelitian desentralisasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian desentralisasi, metodologi, dan isu-isu. Berbagai pendekatan penelitian telah diterapkan pada studi

desentralisasi. Dengan banyaknya studi yang diselesaikan, setiap investigasi pasti menghadapi kendala. Hambatan ini harus diidentifikasi untuk memajukan penelitian masa depan. Untuk menemukan hal-hal tersebut, diperlukan penelitian dengan menggunakan proses telaah pustaka yang sistematis.

Metode tinjauan literatur sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis temuan studi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diberikan sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007). Awalnya, metode SLR digunakan secara luas dalam penelitian farmasi dan medis. Barbara Kitchenham mulai menerapkan metode ini pada sektor komputasi pada tahun 2007. Metode ini sesuai untuk menilai pola penelitian dalam periode tertentu. Metodologi penelitian ini dipusatkan pada pernyataan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana tren penelitian di bidang desentralisasi dari tahun 2017 hingga 2022? (2) Metodologi penelitian apa yang telah digunakan di bidang desentralisasi dari tahun 2017 hingga 2022? (3) Apa masalah penelitian di bidang desentralisasi dari tahun 2017 hingga 2022?

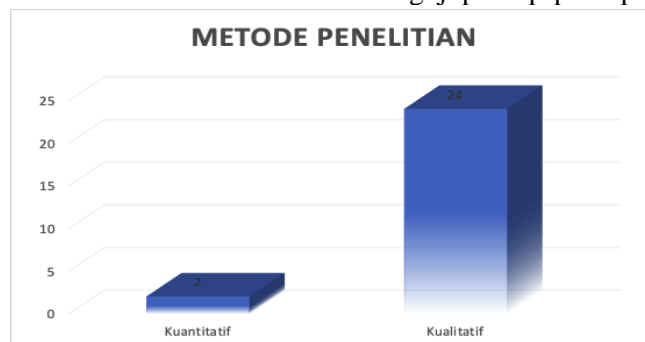
B. Metodologi Penelitian

Tinjauan sistematis dan meta-analisis bertujuan untuk mengidentifikasi tren, metodologi, dan isu-isu dalam penelitian bidang ilmu desentralisasi dengan memeriksa dan menganalisis artikel yang dilakukan antara 2017 dan 2022. Tinjauan sistematis literatur ini dilakukan dengan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) (Liberati et al., 2009). Untuk melakukan pencarian mendalam tentang desentralisasi, peneliti berkonsultasi dengan database Google Scholar dengan kata kunci "perbandingan sistem pemerintahan, desentralisasi, dan masalah" dari 2016 hingga 2021, dengan 200 publikasi. Setiap database berisi direktori berbeda untuk konten terkait. Disertasi yang diterbitkan, buku, abstrak konferensi, dan ulasan tidak termasuk. Selain itu, penelitian yang berlebihan dihilangkan. Judul dan abstrak dari artikel yang dikumpulkan kemudian dievaluasi secara independen terhadap kriteria inklusi oleh tiga sarjana. Studi yang tidak tersedia dalam teks lengkap diperoleh melalui korespondensi dengan penulis dan dikecualikan karena kurangnya akses ke teks lengkap atau tidak ada tanggapan dari penulis. Teks lengkap kemudian ditinjau sesuai dengan kriteria inklusi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ilmu administrasi publik dalam tahun 2016-2021

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 26 penelitian, 24 menggunakan metode penelitian kualitatif dan 2 menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penerbitan desentralisasi, pendekatan penelitian kualitatif meledak. Metode kuantitatif sangat penting dalam penelitian desentralisasi karena metode ini menguji prinsip-prinsip kualitatif.



Gambar 1. Metode Penelitian Desentralisasi tahun 2017-2022

2. Tantangan dalam penelitian ilmu administrasi publik dalam tahun 2017-2022

Penelitian desentralisasi menghadirkan tantangan. Meski tatanan telah berubah, konflik vertikal mengungkapkan resistensi daerah yang tumbuh terhadap kontrol pemerintah pusat. (Huda & Heryansyah, 2019). Orang Indonesia harus memperbaiki institusi yang ada, bukan membangun yang baru. Tujuan utamanya adalah mendemokratisasikan lembaga-lembaga negara sehingga warga dapat mempercayai mereka. (Rachman, 2018). Ketimpangan akan

menghambat pertumbuhan kesehatan Indonesia selama beberapa dekade. Hal ini terutama karena topografi negara kepulauan, keragaman infrastruktur, kemampuan ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah di berbagai daerah, terutama selama desentralisasi. (Noor et al., 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, desentralisasi Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini meningkatkan layanan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola yurisdiksi mereka. Perkembangan desentralisasi di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain: 1) Belum terwujudnya otonomi daerah yang sebenarnya, meskipun telah terjadi pemindahan kewenangan kepada pemerintah daerah, namun pada kenyataannya pemerintah daerah masih terikat oleh berbagai aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan otonomi daerah yang sebenarnya belum terwujud; 2) Belum tercapainya keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah seringkali mengeluhkan bahwa dana yang diterimanya dari pemerintah pusat tidak seimbang dengan tanggung jawab yang harus ditanggungnya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam mengelola wilayahnya; 3) Belum tercapainya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun telah terjadi pemindahan kewenangan kepada pemerintah daerah, namun koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum terjadi dengan baik. Hal ini menyebabkan terjadinya overlapping atau tumpang tindih kewenangan yang dapat menyebabkan konflik; 4) Kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang diterimanya, meskipun telah terjadi pemindahan kewenangan kepada pemerintah daerah, namun kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang diterimanya masih terbatas. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta kurangnya dana yang tersedia untuk mengelola kewenangan tersebut, dan 5) Belum tercapainya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meskipun telah terjadi pemindahan kewenangan kepada pemerintah daerah, namun keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih belum tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih terdapat keterbatasan dalam memberikan akses bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

D. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Tren penggunaan metode dalam penelitian bidang desentralisasi adalah penggunaan metode “Kualitatif”. Metode ini memiliki penggunaan terbanyak dengan persentase sebesar 92,3%. Sedangkan tren penggunaan paling rendah adalah “kuantitatif” dengan persentase 7,7%; dan 2) Tantangan yang dihadapi dalam kajian desentralisasi diantaranya adalah konflik vertikal, Lembaga reformasi dan ketidaksetaraan akses yang sebagian karena geografinya sebagai negara kepulauan dan perbedaan regional dalam infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah, Amerika Serikat secara geografis beragam.

Daftar Pustaka

- Andhika, L. R. (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open government. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102.
- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228–248.
- Fadri, Z. (2020). Pembangunan Masyarakat Alternatif Model Democratic Participatory. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 4(2), 27–39.
- Gómez-Leal, R., Holzer, A. A., Bradley, C., Fernández-Berrocal, P., & Patti, J. (2022). The relationship between emotional intelligence and leadership in school leaders: a systematic review. *Cambridge Journal of Education*, 52(1), 1–21.
- Groat, L., & Wang, D. (2004). Architectural research methods. *Nexus Network Journal*, 6(1), 51–53.
- Harnawansyah, M. F. (2019). Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu

- Umum Legislatif Daerah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 50–64.
- Haryanto, J. T. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 103–116.
- Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 238–258.
- Indra, M. (2021). Gagasan Desentralisasi Asimetris Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dan Menjaga Kedaulatan Negara. *Riau Law Journal*, 5(2), 141–160.
- Jaelani, A. K. (2018). Pengembangan destinasi pariwisata halal pada era otonomi luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 5(1), 56–67.
- Jaya, A. C. (2019). Politik Budaya Melayu: Strategi Kebudayaan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Menghadapi Tantangan Global. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 68–84.
- Johansyah, J. (2018). Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi. *Solusi*, 16(3), 283–292.
- Khair, H. A., Saleh, M., & Sarkawi, S. (2018). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Studi Di Samota (Satonda Moyo Dan Tambora). *Jatiswara*, 33(3), 293–305.
- Lekipiouw, S. H. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. *Sasi*, 26(4), 557–570.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. *Journal of Clinical Epidemiology*, 62(10), e1–e34.
- Modesti, P. A., Reboldi, G., Cappuccio, F. P., Agyemang, C., Remuzzi, G., Rapi, S., Perruolo, E., Parati, G., & Settings, E. S. H. W. G. on C. V. R. in L. R. (2016). Panethnic differences in blood pressure in Europe: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*, 11(1), e0147601.
- Noor, Z. A., Sekarningrum, T. D., & Sulistyarningsih, T. (2021). Disparitas perkotaan-pedesaan: pemerataan dalam akses layanan kesehatan primer untuk lansia selama pandemi Covid-19. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(4), 576–585.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan, S. E. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 1–11.
- Pahlevan-Sharif, S., Mura, P., & Wijesinghe, S. N. R. (2019). A systematic review of systematic reviews in tourism. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 39, 158–165.
- Perceka, A. L. (2018). Analisis Komparatif Angka Kemiskinan Sebagai Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 165–169.
- Permana, R. S. M., & Mahameruaji, J. N. (2020). Perbandingan Konsep-konsep Triumvirate Sunda dengan Trias Politica dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Nyimak: Journal of Communication*, 4(1), 17–33.
- Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 102–108.
- Rachman, N. F. (2018). Meninjau Kembali Teorisasi Mengenal Desentralisasi, Community Driven Delevopment, dan Kapitalisasi Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1), 1–23.

- Rahman, A., Satispi, E., & Adiyasha, D. L. (2020). Perbandingan E-Government Antara Singapura Dan Jepang: Perspektif Determinan Dan Perannya Dalam Mengektifkan Pemerintahan Dan Mengendalikan Korupsi. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 177–199.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.
- Sinaulan, R. L. (2018). Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 31.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73–88.
- Sunarsi, D. (2018). Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategik & Karakterisrik Sistem Pendukungnya: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, &* <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/461>
- Thamrin, A. (2019). Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(1), 33–51.
- Yulianingrum, A. V., Sunariyo, S., & Prasetyo, B. (2022). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif dan Perbandingannya). *Jurnal Ilmiah AdvokasI*, 10(2), 171–192.
- Zempi, C. N., Maryam, S., & Priyono, P. (2022). E-Government Sebagai Realisasi Sistem Jaringan Terdesentralisasi Di Indonesia: Implikasi Sosial Dan Politik. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 27–36.